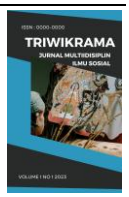
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PARTISIPASI MASYARAKAT VS KEBIJAKAN PEMERINTAH: ANALISIS KONTROVERSI DAN SOLUSI ATAS PENGELOLAAN SAMPAH YANG TIDAK EFEKTIF

Ferdy Adyansah Maulana[1], Mokhammad Miftakhul Huda[2]
[12]Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 2025
Revised Desember 2025
Accepted Desember 2025
Available online Desember 2025

Email:
namanyaferdy@gmail.com[1],
dr.hoeda@uinkhas.ac.id [2]

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abtrak

Studi ini mengkaji kontroversi yang terus berlanjut antara partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi praktik pengelolaan sampah yang tidak efektif di Indonesia. Isu ini perlu diangkat karena negara ini terus menghadapi peningkatan produksi sampah, sementara kebijakan dan inisiatif berbasis masyarakat yang ada belum menghasilkan hasil yang optimal. Studi-studi sebelumnya telah membahas kedua aspek ini secara terpisah, namun hanya sedikit yang mengintegrasikannya untuk mengevaluasi bagaimana konflik kepentingan dan terbatasnya koordinasi berkontribusi terhadap kegagalan kebijakan. Oleh karena itu, makalah ini merumuskan permasalahan dengan menganalisis bagaimana regulasi pemerintah dan keterlibatan masyarakat berinteraksi, tumpang tindih, atau saling bertentangan dalam praktik pengelolaan sampah. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi lapangan, dilengkapi dengan data sekunder dari dokumen kebijakan dan literatur ilmiah. Data dianalisis melalui reduksi tematik, kategorisasi, dan interpretasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan kebijakan yang lemah, fasilitas yang tidak memadai, dan partisipasi publik yang tidak konsisten tetap menjadi hambatan utama bagi penanganan sampah yang efektif. Studi ini menyimpulkan bahwa menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan inisiatif berbasis masyarakat sangat penting untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Pemerintah, Pengelolaan Sampah.

Abstract

This study examines the ongoing controversy between community participation and government policy in addressing ineffective waste management practices in Indonesia. This issue needs to be raised because the country continues to face increasing waste production, while existing community-based policies and initiatives have not produced optimal results. Previous studies have discussed these two aspects separately, but few have integrated them to evaluate how conflicts of interest and limited coordination contribute to policy failure. Therefore, this paper formulates the problem by analysing how government regulations and community involvement interact, overlap, or conflict with each other in waste management practices. Using descriptive qualitative methods, this study collected primary data through interviews and field observations, supplemented by secondary data from policy documents and scientific literature. The data were analysed through thematic reduction, categorisation, and interpretation. The findings show that weak policy enforcement, inadequate facilities, and inconsistent public participation remain major obstacles to effective waste management. This study concludes that aligning government policies with community-based initiatives is essential for building a more collaborative and sustainable waste management system.

Keywords: Community Participation, government policy, Waste management

Pendahuluan

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu global yang semakin mendesak untuk ditangani karena dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat (Kamore et al., 2024). Kondisi di Indonesia memperlihatkan bahwa jumlah tiap bulan sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, sementara sistem pengelolaannya masih belum optimal.Data menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 60 juta ton sampah per tahun. Sebagian besar sampah tersebut berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah melebihi kapasitas. Di sisi lain, praktik pengelolaan

berbasis masyarakat seperti bank sampah, daur ulang, dan pengurangan sampah plastik sekali pakai masih menghadapi tantangan partisipasi publik(Masruroh & Rozak, 2025). Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dapat berjalan selaras dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang kompleks(Nuryana et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan sampah dari sudut pandang kebijakan maupun peran masyarakat (Prayudha & Rajab, 2025). Studi yang dilakukan menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah. Misalnya, penerapan kebijakan reduce, reuse, recycle telah dijalankan di beberapa kota besar(Muljaningsih et al., 2023). Sementara itu, riset menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, khususnya melalui komunitas lingkungan dan bank sampah, mampu menurunkan jumlah sampah rumah tangga hingga 30%(Susanto et al., 2024). Namun, literatur juga mengungkapkan adanya keterbatasan, seperti lemahnya pengawasan kebijakan dan rendahnya konsistensi partisipasi publik (Febyanti et al., 2022). Hal ini menandakan bahwa meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi, masih terdapat ruang untuk kajian kritis terhadap hubungan antara kebijakan pemerintah dan keterlibatan masyarakat.

Meski literatur yang ada telah membahas peran pemerintah dan masyarakat, kajian yang mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka analisis masih jarang dilakukan (Kamore et al., 2024). Sebagian besar penelitian cenderung fokus pada efektivitas kebijakan secara struktural atau pada program berbasis komunitas, tetapi tidak secara komprehensif menganalisis interaksi dan potensi konflik di antara keduanya (Rizky et al., 2024). Misalnya, kebijakan pelarangan kantong plastik yang digagas pemerintah seringkali belum diiringi dengan kesiapan masyarakat dalam menyediakan alternatif ramah lingkungan(Supratiwi, 2025). Demikian pula, gerakan masyarakat dalam daur ulang sering terbentur pada kurangnya dukungan regulasi atau insentif yang memadai. Akibatnya, efektivitas pengelolaan sampah menjadi terbatas karena masing-masing pihak bekerja secara parsial. Inilah celah penelitian yang ingin diisi dengan mengkaji secara mendalam dinamika partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam konteks pengelolaan sampah(Yamtana et al., 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa persoalan sampah bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga menyangkut tata kelola, perilaku sosial, dan kebijakan publik(Master Program of Built Environment Architecture, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya, Indonesia et al., 2025). Tanpa adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, upaya pengelolaan sampah akan selalu menghadapi hambatan(Dewi & Roziqin, 2022). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan top-down dari pemerintah sering tidak mendapat dukungan penuh karena kurangnya sosialisasi atau fasilitas yang memadai. Di sisi lain, inisiatif masyarakat sering terhenti karena keterbatasan dana, dukungan hukum, atau koordinasi. Dengan menelaah kedua sisi ini, penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai akar masalah sekaligus solusi yang bersifat aplikatif (Jati, 2013). Maka, penelitian ini memiliki nilai strategis baik secara akademis maupun praktis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, dan gap penelitian, maka tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis kontroversi sekaligus mencari solusi atas ketidakefektifan pengelolaan sampah melalui perspektif partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran keduanya dapat saling melengkapi atau justru menimbulkan konflik dalam praktik. Secara khusus, penelitian bertujuan mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kebijakan pemerintah terkait sampah mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan merumuskan model kolaboratif yang lebih efektif(Fitriani et al., 2024a). Hipotesis yang diajukan adalah

bahwa kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat akan menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan (Islamiati, 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan arah kebijakan yang konkret. Hasilnya diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, maupun komunitas dalam memperkuat strategi pengelolaan sampah di Indonesia(Yusriadi et al., 2023a).

Metode

Penelitian ini difokuskan pada isu partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah karena masalah tersebut memiliki relevansi tinggi dengan kondisi sosial dan lingkungan saat ini (Nimas Ajeng Sitoresmi & Mila Karmilah, 2025a). Laju produksi sampah yang semakin meningkat setiap tahun menuntut adanya penelitian yang mampu memberikan kontribusi praktis sekaligus akademis dalam mencari solusi efektif (Nugraha et al., 2018). Salah satu alasan utama pemilihan isu ini adalah meningkatnya kesenjangan antara kebijakan yang dibuat pemerintah dengan keterlibatan masyarakat dalam implementasinya. Selain itu, isu ini juga mencerminkan tantangan pembangunan berkelanjutan yang sedang menjadi perhatian global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena serta menganalisis hubungan interaktif antara kebijakan dan partisipasi (Elamin et al., 2018a). Dengan jenis penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan efektif.

Sumber data penelitian ini berasal dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Pemilihan sumber data dilakukan untuk memastikan penelitian memiliki landasan empiris yang kuat sekaligus dukungan teoretis yang memadai(Haidah & Yunus, 2025). Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan pihak pemerintah daerah, pengelola bank sampah, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam program pengelolaan sampah (Nagong, 2021).Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kebijakan, jurnal akademik, dan berita terkait implementasi kebijakan sampah di Indonesia. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni memilih responden yang dianggap paling memahami permasalahan berdasarkan keterlibatan dan pengalamannya(Hidayah et al., 2022). Dengan kombinasi data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan realitas yang objektif sekaligus mempertajam analisis teoritis.

Dalam proses penelitian, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi untuk menghasilkan temuan yang valid. Teknik utama adalah wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, sehingga data yang dikumpulkan bersifat triangulatif (Elamin et al., 2018b). Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta kendala yang dihadapi aktor-aktor terkait pengelolaan sampah. Observasi dilakukan di lokasi pengelolaan sampah dan bank sampah guna melihat secara langsung praktik yang berlangsung(Kumara & Wardani, 2025). Dokumentasi berupa laporan resmi dan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pembanding dan penguat temuan di lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dimulai dari tahap reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan pemahaman yang terstruktur mengenai interaksi antara partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah(Fadli, 2021).

Hasil DAN Diskusi

Hasil

Controversi dalam pengelolaan sampah di Indonesia terletak pada ketidakharmonisan antara partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah (Humaira, 2021). Bentuk permasalahan yang diangkat meliputi perilaku membuang sampah sembarangan, minimnya disiplin memilah

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

sampah dari sumbernya, serta belum optimalnya sistem distribusi informasi dan sarana pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Faktor utama yang mempengaruhi munculnya masalah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya fasilitas pendukung pemilahan, serta distribusi sosialisasi kebijakan pemerintah yang belum merata(Akramila, 2024). Selain itu, regulasi yang mengatur pengelolaan sampah seringkali kurang tegas dan belum memicu masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan kebiasaan pengelolaan sampah yang benar.

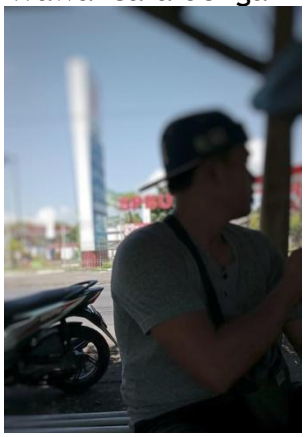
Implikasi dari isu ini sangat luas dan bersifat transformasional. Ketika kebijakan pemerintah tidak didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, volume sampah yang tidak terolah akan meningkat, memperparah pencemaran tanah, air, dan udara (Haswindy & Yuliana, 2018). Di sisi lain, transformasi dapat dicapai melalui penyediaan sarana-prasarana pendukung, penanaman nilai kepedulian lingkungan sejak dini, pemerataan sosialisasi program, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Nimas Ajeng Sitoresmi & Mila Karmilah, 2025b). Dengan partisipasi yang kuat dan sinergi kebijakan, tercipta lingkungan yang sehat potensi ekonomi dari produk daur ulang meningkat, dan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik (Fauzia & Arieffiani, n.d.-a).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber berikut penjelasan dari hasil wawancarannya:

> “itu biasanya memuat sampah pakai truk dan kapasitas muatan sampahnya kurang lebih 3 sampai 4 ton sampah perhari dan sampah yang di muat itu terdiri dari sampah organik, non-organik dan b3 setelah di muat sampah itu di kirim ke tempat pengolahan sampah dan untuk sampah organik dan non-organik dan b3 itu di pisah antara ketiganya.” (Bambang, 2025)

penjelasan wawancara di atas bahwa sampah diangkut menggunakan truk dengan kapasitasnya sekitar 3 hingga 4 ton perhari. Sampah yang diangkut terdiri dari tiga jenis utama organic, anorganik, dan b3. Setelah diangkut ke tempat pengolahan, sampah-sampah ini dipisahkan menurut jenisnya untuk memudahkan proses pengelolaan. Sampah organik biasanya diolah menjadi kompos atau biogas melalui proses fermentasi, Sampah anorganik diolah dengan proses pemilihan, pencucian, dan daur ulang menjadi produk kreatif atau bahan baku industri. Sedangkan sampah B3 dikumpulkan secara terpisah dan diolah sesuai standar keamanan khusus agar tidak membahayakan lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat, misalnya dengan dibawa ke fasilitas pengolahan limbah berizin atau melalui proses pembakaran yang aman. Proses pemisahan ini penting untuk mengurangi polusi dan memaksimalkan pemanfaatan kembali sampah.

Gambar 1. Wawancara dengan narasumber



Catatan: Dokumentasi Peneliti (2025)

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Proses pemilihan sampah di titik pengolahan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan mendukung prinsip pengurangan sampah serta di daur ulang.

Tabel 1 pola pengolahan sampah oleh masyarakat

No	Jenis Sampah	Cara Pengolahan	Hasil Pengolahan	Manfaat atau danpak positif
1	Sampah organik(sisa makanan, daun dan sayur)	Di daur ulang menjadi kompos melalui proses fermentasi atau menggunakan alat komposter	Pupuk kompos, biogas	Mengurangi banyaknya sampah, menghasilkan pupuk alami dan meningkatkan kesuburan tanah
2	sampah anorganik(pelastik, logam, kaca)	Pemilihan, pencucian, Dan daur ulang menjadi bahan baru atau produk kreatif	Kerajinan tangan, bahan baku industri	Mengurangi pencemaran lingkungan dan menambah penghasilan warga/masyarakat
3	Sampah berbahaya(beterai, Obat, elektronik	Pengumpulan terpisah dan pengiriman ke fasilitas pengolahan limbah berizin	Limbah di olah sesuai standar keamanan	Mencegah pencemaran tanah dan air, menjaga kesehatan masyarakat

tabel diatas menjelaskan tentang jenis-jenis sampah, cara pengolahannya, hasil pengolahan, dan manfaat atau dampak positif yang dihasilkan. Sampah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun dapat diolah menjadi kompos atau biogas yang bermanfaat bagi tanah. Sampah anorganik seperti plastik dan logam bisa didaur ulang menjadi kerajinan atau bahan industri, sehingga mengurangi polusi dan bisa menghasilkan uang. Sampah berbahaya seperti baterai dan obat-obatan harus dikumpulkan secara terpisah dan diolah khusus agar tidak mencemari tanah dan udara serta menjaga kesehatan masyarakat.

Tabel 2 dokumentasi sampah organik, anorganik, berbahaya(b3)



Catatan : dokumentasi penelitian, 2025

Sampah organik sejenis sampah yang berasal dari sisa makanan, dan pertanian misalnya sisa sayur, buah, nasi basi, kulit telur dll. sampah organik di olah melalui proses penguraian alami menjadi pupuk atau dengan fermentasi untuk menghasilkan biogas.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Catatan : dokumentasi penelitian, 2025

Sampah anorganik sejenis sampah yang berasal dari bahan non-hayati (bukan mahluk hidup) dan sulit terurai secara alami oleh mikroorganisme. Sampah ini berasal dari bahan-bahan sintetik atau hasil olahan industri yang tidak dapat di uraikan oleh alam contohnya: bungkus plastik, botol minuman, karet dll



Catatan : dokumentasi penelitian, 2025

Sampah berbahaya jenis sampah yang mengandung zat beracun, korosif, mudah terbakar, atau menimbulkan efek racun bagi manusia, hewan dan lingkungan. Sampah berbahaya ini berasal dari rumah tangga, pertanian, rumah sakit dll. contohnya: baterai bekas, obat kadaluwarsa, oli, dan limbah medis seperti jarum suntik.

Diskusi

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, pengelolaan sampah di masyarakat mencakup tiga jenis utama, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya. Sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan sayur diolah kembali menjadi pupuk kompos atau biogas melalui proses fermentasi. Sampah anorganik seperti plastik, logam, dan kaca diolah dengan cara pemilahan, pencucian, dan daur ulang menjadi produk baru seperti kerajinan tangan atau bahan industri. Sementara itu, sampah berbahaya seperti baterai, obat, dan limbah elektronik harus dikumpulkan secara terpisah dan dikirim ke fasilitas pengolahan berizin agar tidak mencemari lingkungan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki potensi besar dalam mengelola sampah apabila didukung oleh kebijakan pemerintah yang tepat(Rahmadani, 2024). Namun, masih terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan di lapangan karena keterbatasan sarana, pengetahuan, dan koordinasi antara masyarakat serta pemerintah (Lor, 2023a). Secara umum, data menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi aktif warga dan kebijakan yang mendukung.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

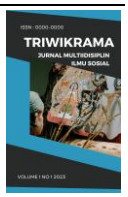
Rendahnya efektivitas pengelolaan sampah terjadi karena berbagai faktor penyebab yang saling berkaitan antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu penyebab utama adalah lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari rumah tangga (D. R. Putri et al., 2024). Banyak warga masih menganggap pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Di sisi lain, pemerintah sering kali belum menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai, seperti tempat pemilahan, alat komposter, serta sistem pengangkutan yang terpisah untuk setiap jenis sampah(Fitriani et al., 2024b). Sosialisasi mengenai cara pengolahan sampah berkelanjutan juga masih kurang intensif, sehingga program daur ulang dan pengumpulan sampah berbahaya belum berjalan optimal(Sulistiyani & Dahlia, 2024a). Kurangnya pengawasan serta koordinasi antarinstansi memperparah situasi ini. Refleksi ini menunjukkan bahwa akar persoalan bukan hanya pada ketersediaan kebijakan, tetapi pada lemahnya penerapan dan keterlibatan publik dalam praktiknya.

Dampak dari kondisi tersebut sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Sampah organik yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sumber penyakit(Yusriadi et al., 2023b). Sampah anorganik seperti plastik yang dibuang sembarangan menyebabkan pencemaran tanah dan air, bahkan berkontribusi pada masalah global seperti perubahan iklim dan mikroplastik di laut. Sampah berbahaya yang tidak dipisahkan secara benar dapat mencemari tanah serta sumber air, yang pada akhirnya membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, ketidakefisienan dalam sistem pengelolaan sampah menurunkan keindahan lingkungan dan menciptakan beban tambahan bagi pemerintah daerah dalam biaya pembersihan (Ritonga, 2023). Kurangnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah menyebabkan banyak kebijakan tidak berjalan efektif. Dengan demikian, interpretasi dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kegagalan dalam pengelolaan sampah berdampak luas, baik secara ekologis, sosial, maupun ekonomi(Lestari & Saptutyningsih, 2023).

Hasil temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah (Lor, 2023b). Misalnya menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dapat berhasil apabila didukung oleh pendidikan lingkungan dan kebijakan yang berorientasi pada partisipasi warga. Hal ini juga sejalan dengan studi yang menyoroti keberhasilan sistem waste bank di Surabaya karena adanya kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat. Namun, berbeda dengan yang menekankan bahwa kemajuan teknologi seperti mesin daur ulang otomatis adalah faktor utama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi tidak akan berfungsi tanpa kesadaran sosial dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa dimensi sosial dan kebijakan partisipatif menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan(Azis et al., 2024).

Sebagai langkah solusi, perlu dikembangkan model pengelolaan sampah berbasis kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah (Wahyono et al., 2016). Secara konseptual, paradigma kebijakan perlu bergeser dari pendekatan administratif menjadi pendekatan partisipatif berbasis masyarakat. Pemerintah dapat memperkuat edukasi lingkungan melalui kurikulum sekolah, kampanye publik, dan pelatihan pengolahan sampah rumah tangga. Secara metodologis, perlu diterapkan sistem community-based waste management yang memberikan peran nyata bagi warga dalam memilah dan mendaur ulang sampah (Setiadi, 2015). Dari sisi kebijakan, pemerintah harus mempertegas regulasi tentang pemilahan sampah di sumbernya serta memberikan insentif bagi masyarakat yang berkontribusi aktif(Sulistiyani & Dahlia, 2024b). Selain itu, fasilitas pengolahan limbah berbahaya perlu diperbanyak dan diawasi secara ketat. Melalui kombinasi kebijakan, edukasi, dan partisipasi aktif, pengelolaan sampah dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Simpulan dan Saran

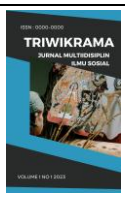
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah sangat bergantung pada keterpaduan antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan data lapangan, jenis sampah yang dikelola oleh masyarakat meliputi sampah organik, anorganik, dan berbahaya, masing-masing dengan cara dan hasil pengolahan yang berbeda. Sampah organik diolah menjadi kompos atau biogas, sampah anorganik dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku industri atau kerajinan, sedangkan sampah berbahaya dikelola melalui fasilitas pengolahan khusus. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki potensi besar dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan apabila mendapatkan dukungan kebijakan yang tepat. Namun, ketidaksesuaian antara kebijakan top-down pemerintah dengan kesiapan masyarakat di lapangan masih menjadi kendala utama. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kolaborasi yang tidak harmonis menyebabkan sistem pengelolaan sampah berjalan parsial dan tidak efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat teori kolaborasi sosial dalam konteks kebijakan lingkungan, khususnya pada bidang pengelolaan sampah. Studi ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan struktural semata, melainkan harus melibatkan perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai pentingnya community-based waste management, di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam sistem kebersihan lingkungan. Dari sisi metodologis, penelitian ini menampilkan pendekatan kualitatif deskriptif yang mampu menggambarkan dinamika sosial, budaya, dan administratif secara utuh antara pemerintah dan warga. Kontribusi praktisnya terletak pada penegasan bahwa sinergi dua pihak akan memperkuat efektivitas kebijakan, memperkecil dampak pencemaran, serta menciptakan manfaat ekonomi melalui daur ulang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi pemerintah daerah maupun akademisi dalam mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi public.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan studi selanjutnya. Pertama, penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan deskriptif dan belum sepenuhnya mengukur efektivitas kebijakan secara kuantitatif, sehingga hasilnya bersifat interpretatif. Kedua, lingkup penelitian terbatas pada satu wilayah, yakni Kabupaten Jember, sehingga generalisasi temuan terhadap konteks nasional masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini belum secara mendalam membahas peran sektor swasta, inovasi teknologi, dan aspek ekonomi sirkular dalam sistem pengelolaan sampah. Oleh karena itu, penelitian di masa depan diharapkan dapat menggunakan pendekatan mixed methods untuk memperkuat validitas data dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk meneliti potensi penggunaan teknologi digital dan sistem insentif ekonomi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan memperluas cakupan analisis tersebut, diharapkan model pengelolaan sampah di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak pihak dalam pengolaan sampah yang sudah berpartisipasi dalam penelitian ini. ucapan terimakasi juga kepada dosen pengampuh mata kuliah penulisan dan publikasi karya ilmia yang telah memberikan araham, langkah-langkah dan selalu memberi semangat kepada kami hingga dapat menyelesaikan penelitian ini, penelitian ini tidak akan ada hasilnya tanpa dukungan dari pihak pihak yang membantu kami.



Daftar Pustaka

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). *Dashboard Pengurangan Sampah – Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*.

Kompas. (2023). *"The Long Road to Closing Open Dumping Landfills in Indonesia"*.

Salsabila, L., Purnomo, E. P., & Jovita, H. D. (2023). *The Importance of Public Participation in Sustainable Solid Waste Management*. Journal of Governance and Public Policy, 8(2).

Adawiah, W., Hanindraputri, E. K., & Kamalsyah, M. (2024). *Leadership, Innovation and Community Participation Pillar of Institutionalization in Bank Sampah Induk Surabaya*.

Dietplastik Indonesia. (2022). *Jakarta Reuse Movement: An Attempt to Make Reuse Lifestyle More Accessible*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2019). *Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional*. Jakarta: KLHK.

UNEP (United Nations Environment Programme). (2018). *Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability*. Nairobi: UNEP

World Bank. (2018). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Washington, DC: World Bank.

Ostrom, E. (2010). *Polycentric systems for coping with collective action and global environmental change*. *Global Environmental Change*, 20(4), 550–557.

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.

Setiawan, B. (2017). *Governance dan Lingkungan: Partisipasi Publik dalam Kebijakan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (Referensi klasik untuk metode kualitatif di konteks Indonesia.)

Damanhuri, E., & Padmi, T. (2019). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: ITB Press. (Membahas kondisi pengelolaan sampah di Indonesia dan tantangannya.)

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). *Designing Qualitative Research*. Sage.

Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Pearson.

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Silverman, D. (2013). *Doing Qualitative Research*. Sage Publications.

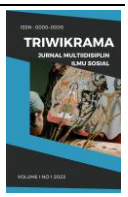
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

" (Bambang, 2025).

Khanal, S. K. (2008). *Anaerobic Biotechnology for Bioenergy Production: Principles and Applications*. Wiley-Blackwell.

Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2004). *SNI 19-7030-2004 tentang Pengolahan Sampah Organik secara Kompos*. Jakarta: BSN.



Hopewell, J., Dvorak, R., & Kosior, E. (2009). *Plastics recycling: challenges and opportunities*. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 364(1526), 2115–2126.

UNEP (United Nations Environment Programme). (2018). *Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability*. Nairobi: UNEP.

US EPA (United States Environmental Protection Agency). (2020). *Household Hazardous Waste (HHW)*.

WHO (World Health Organization). (2014). *Safe Management of Wastes from Health-care Activities*.

Damanhuri, E., & Padmi, T. (2016). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: ITB Press.

Sukwani, A. (2020). "Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R." *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 7(2), 112–124.

Sujarwoto, S., & Maharani, A. (2020). Community participation in solid waste management: Evidence from Indonesia. *Journal of Environmental Management, 271*, 110944